

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Perpustakaan desa memiliki tugas pokok untuk melayani masyarakat dengan pelayanan terbaik, untuk itu perlu dilakukan inovasi program dalam mengembangkan layanan perpustakaan. Terdapat penelitian yang terkait dengan pengembangan layanan perpustakaan desa, yang dalam penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan serta menunjukkan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian ini.

Penelitian sejenis sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari dengan judul “Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa Penyandingan Kecamatan Teluk Gelam Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (SNP: 2013)”. Penelitian yang dilakukan pada Tahun 2018. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi pengembangan perpustakaan Desa Penyandingan Kec. Teluk Gelam Kabupaten Ogan dan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan layanan perpustakaan Desa Penyandingan berdasarkan SNP: 2013. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengembangan perpustakaan Desa Penyandingan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ayu menunjukkan bahwa Perpustakaan Desa Penyandingan telah melakukan pengembangan perpustakaan dengan baik yang fokus pengembangannya pada penyediaan fasilitas maupun penambahan koleksi di perpustakaan. Hal ini dilakukan sebagai cara dalam menarik

pengunjung perpustakaan. Selain itu hasil penelitian Ayu menunjukkan bahwa perpustakaan Desa Penyandingan telah mengembangkan layanan perpustakaan berdasarkan SNP: 2013.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai strategi pengembangan perpustakaan Desa. Persamaan lain terletak pada pemilihan desain dan jenis penelitian, yaitu sama-sama menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun untuk perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan Ayu memiliki fokus pada pengembangan perpustakaan, penerapan SNP: 2013 dalam pelayanan perpustakaan dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam memenuhi SNP: 2013. Adapun peneliti hanya fokus pada inovasi program Bank Sampah sebagai upaya pengembangan perpustakaan Mutiara Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Semarang.

Penelitian kedua yaitu sebuah Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol. 5 No 4 Tahun 2016 (81-90) dengan judul "Peran Perpustakaan Desa "Mutiara" dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang" yang dilakukan oleh Raglina Siti Maskurotunitsa memiliki fokus penelitian peran Perpustakaan Desa "Mutiara" dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perpustakaan desa "Mutiara" dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif

dengan metode penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori Sutarno NS tentang maksud pembentukan perpustakaan bagi masyarakat.

Hasil dari penelitian Raglina Siti Maskurotunitsa adalah peran Perpustakaan Desa “Mutiara” dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai pembantu dan pendukung masyarakat Desa Kalisidi dalam meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi pribadi yang mandiri dan berpotensi. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Desa ”Mutiara” dalam bidang pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Masyarakat menjadi lebih giat dan termotivasi dengan adanya program pemberdayaan tersebut.

Pada penelitian yang kedua juga memiliki perbedaan fokus penelitian dan teori. Fokus penelitian pada peneliti sejenis sebelumnya adalah peran Perpustakaan Desa “Mutiara” dalam pemberdayaan masyarakat serta teori yang digunakan adalah teori Sutarno NS tentang maksud pembentukan perpustakaan bagi masyarakat. Perbedaan selanjutnya terletak pada metodologi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Raglina menggunakan Desain penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus tunggal. Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Penelitian ketiga yaitu sebuah Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3 No. 5 Hal 770-774 Tahun 2015 dengan judul “Implementasi Program PERPUSERU dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan (Studi Kasus Pada *Corporated Social Responsibility Coca Cola Foundation* Indonesia di Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo) yang dilakukan oleh Fidan Safira,dkk memiliki fokus penelitian implementasi program yang mencakup implementer dan sasaran

program, *output* dan *outcome program* PerpuSeru serta faktor pendukung dan penghambat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implentasi program PerpuSeru dalam upaya meningkatkan pelayanan perpustakaan di Perpustakaan Sidoarjo, untuk mengidentifikasi *output* dan *outcome* serta faktor yang mendukung dan menghambat dari implementasi program tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori menurut Abdullah (2014), sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dalam kegiatan implementasi yaitu target kelompok, unsur pelaksanaan atau implementer, dan faktor lingkungan.

Hasil dari penelitian Fidan Safira, adalah implementasi program PerpuSeru di Kabupaten Sidoarjo yaitu pemberian bantuan fisik dan pemberian pelatihan serta pendampingan mengenai strategi rencana kerja, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan prima serta advokasi dan pelibatan masyarakat. Manfaat baik secara *output* maupun *outcome* dari implementasi program PerpuSeru di Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo yaitu bantuan fisik memiliki *output* untuk meningkatkan sarana dan prasarana di perpustakaan serta meningkatka fungsi perpustakaan baik secara rekreatif, kultural maupun sarana simpan karya manusia. Adapun bantuan pelatihan dalam lima paket pelatihan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman SDM perpustakaan mengenai strategi perencanaan kerja, layanan prima, promosi, dan teknologi informasi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan layanan di Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendukung dalam implementasi program PerpuSeru di perpustakaan Kabupaten

Sidoarjo adalah sumber daya yang memadai. Baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Adapun faktor penghambatnya adalah komunikasi yang kurang dinamis dari berbagai pihak.

Pada penelitian yang ketiga memiliki perbedaan pada fokus penelitian dan teori. Fokus penelitian pada peneliti sejenis sebelumnya adalah implementasi program yang mencakup implementer dan sasaran program, *output* dan *outcome* program PerpuSeru serta faktor pendukung dan penghambat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori menurut Abdullah (2014), yang menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dalam kegiatan implementasi yaitu target kelompok, unsur pelaksanaan atau implementer, dan faktor lingkungan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Pengembangan Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa merupakan suatu jenis perpustakaan umum, peran perpustakaan dalam suatu desa sangatlah penting. Mengingat bahwa dengan adanya perpustakaan desa dapat memperbaiki kesejahteraan hidup, meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga dapat menjadi bekal dalam pengembangan diri. Menurut definisi dari Standar Nasional Perpustakaan (2001: 2), perpustakaan desa adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa atau kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

Menurut Sutarno NS (2008: 9) Perpustakaan desa adalah lembaga layanan publik yang berada di desa. Sebuah unit layanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat tersebut. Tujuannya untuk memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan, pendidikan dan rekreasi kepada semua lapisan masyarakat. Masyarakat yang dilayani terdiri atas semua penduduk yang beraneka ragam latar belakangnya. Masyarakat tinggal di suatu desa dengan memiliki suatu ikatan yang erat dan bervariasi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat, bahwa perpustakaan desa merupakan lembaga pelayanan kepada masyarakat yang melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang informasi dan ilmu pengetahuan, dalam rangka menunjang program pembelajaran sepanjang hayat serta membantu menunjang kesejahteraan hidup masyarakat.

Agar perpustakaan desa dapat melayani masyarakat dengan baik maka perpustakaan harus dikelola secara profesional berdasarkan sistem dan ketentuan umum yang berlaku pada ruang lingkup pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat seperti dengan keluarnya intruksi Mendagri No 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan desa atau kelurahan, yang menjelaskan mengenai pentingnya perpustakaan desa untuk mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk perpustakaan desa. Selain intruksi tersebut, ada beberapa landasan hukum yang mendasari terbentuknya sebuah perpustakaan desa.

Landasan hukum adalah sebuah dasar hukum atau sebuah pondasi untuk membentuk, menyelenggarakan, dan membina berdirinya suatu perpustakaan desa. Menurut Sutarno N.S.(2008) landasan hukum itu memberikan kepastian tentang apa yang harus dan wajib dilakukan, apa yang dilarang atau tidak boleh dikerjakan dan akibat-akibat yang akan ditimbulkan. Landasan hukum perpustakaan desa telah mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan berkembangnya zaman dan kebutuhan. Hal tersebut memiliki pengaruh dengan adanya keberadaan dan perkembangan perpustakaan desa pada saat ini. Landasan hukum yang mendasari yaitu:

1. Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, adalah produk hukum terbaru dan komprehensif untuk perpustakaan
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan UU ini maka wewenang untuk membentuk atau menyelenggarakan perpustakaan di daerah berada pada pemerintah daerah.
3. Peraturan pemerintah (PP) nomor 38 tahun 1953 tentang penyerahan secara resmi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perpustakaan termasuk yang telah diserahkan itu. Peraturan itu merupakan landasan hukum yang pertama kali untuk membentuk dan menyelenggarakan perpustakaan kelurahan yang sudah ditindaklanjuti dengan peraturan yang lain.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tentang pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan desa. Peraturan itu telah direspon

oleh pemerintah daerah dengan membentuk berbagai perpustakaan desa.

Adanya landasan hukum memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi asas formal dan legal, di samping menjadi kekuatan moral dari seluruh warga masyarakat. Sumber hukum juga menjadi alasan tentang apa, mengapa dan bagaimana perpustakaan itu ada dibentuk dan untuk siapa. Selain itu, landasan hukum merupakan sumber kekuatan dan alasan yang tepat untuk melakukan penggalian dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasional dan mengembangkan organisasi.

Sejak awal didirikan perpustakaan jenis apapun, perpustakaan memiliki kegiatan utama yaitu mengumpulkan semua jenis sumber informasi dalam berbagai bentuk, yakni bentuk tertulis, terekam, atau dalam bentuk yang lain, seperti halnya dengan perpustakaan desa. Soekarman (2000: 8) menjelaskan sebuah perpustakaan desa yang dibentuk akan berwujud sebagai suatu lembaga atau unit kerja apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ketenagaan

Sesuai dengan tujuan dan fungsi perpustakaan Desa/Kelurahan yang cukup strategis, maka persyaratan-persyaratan yang dituntut untuk petugas perpustakaan desa adalah persyaratan mental, persyaratan pengetahuan, dan teknik-teknik penyelenggaraan perpustakaan desa secara umum.

2. Anggaran

Anggaran perpustakaan desa seyogyanya dianggarkan secara teratur dan terprogram dan dimasukkan dalam program pembangunan desa/kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar oprasional layanan perpustakaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3. Koleksi

Perpustakaan Desa yang baru didirikan diharapkan mempunyai koleksi dasar sekurang-kurangnya 1000 judul (2500 eksemplar). Adapun komposisi jenis koleksi yang dimiliki Perpustakaan Desa seyogyanya adalah dengan perbandingan non fiksi 60% dan fiksi 40%. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat pemakai dapat memperluas pengetahuan umum dan keterampilan yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari.

4. Layanan

Kegiatan layanan adalah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat pemakai jasa perpustakaan akan bahan pustaka yang mereka butuhkan. Jenis layanan yang ada di perpustakaan desa secara umum yaitu :

a) Layanan Membaca di Perpustakaan

Layanan membaca adalah layanan utama setiap perpustakaan, dimana para pengunjung dapat memanfaatkan bahan pustaka di ruang baca yang disediakan di perpustakaan.

b) Pelayanan peminjaman dan pengembalian (sirkulasi)

Pelayanan peminjaman dan pengembalian menyangkut peraturan peminjaman, pengembalian, sistem pelayanan peminjaman, dan bahan-bahan yang boleh dipinjamkan.

Adanya keempat unsur tersebut maka suatu lembaga dapat dikatakan sebagai sebuah perpustakaan desa. Akan tetapi, keberadaan suatu perpustakaan saja tidak cukup untuk menjadi indikator suatu perpustakaan tersebut mengalami perkembangan, melainkan harus diikuti dengan kemampuan sebuah perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi lembaga pendidikan, seperti sekolah-sekolah di sekitar perpustakaan tersebut berada dan komunitas mayoritas di sekitar perpustakaan, misalnya komunitas petani, meskipun perpustakaan tersebut hanya memiliki perencanaan strategis pengembangan layanan dan struktur organisasi yang sederhana. Selain itu, menurut Valeda (2015:24) tingginya frekuensi baca di suatu perpustakaan juga bisa menjadi indikator keberhasilan suatu perpustakaan dalam melakukan pengembangan layanan guna meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di sekitarnya sebagaimana hasil penemuan di perpustakaan desa Kitengesha yang menunjukkan pengaruh positif tingginya frekuensi baca para pelajar di sekitarnya kepada tingginya nilai akademik. Dengan demikian, segala usaha yang mampu meningkatkan frekuensi baca di suatu perpustakaan atau tingkat pemenuhan kebutuhan informasi para pelajar atau komunitas mayoritas di sekitarnya bisa dikatakan sebagai salah satu upaya pengembangan layanan perpustakaan.

Pengembangan perpustakaan desa bisa terwujud apabila seluruh pegawai perpustakaan telah memiliki keahlian, kompetensi serta loyalitas terhadap perpustakaan yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat desa. Selain itu adanya anggaran yang dikelola dengan tepat serta koleksi yang mencukupi kebutuhan informasi masyarakat merupakan sarana pendukung

terwujudnya perpustakaan desa yang maju. Untuk mewujudkan peningkatan minat baca pada masyarakat perpustakaan perlu menentukan langkah inovatif berupa program pengembangan perpustakaan khususnya dalam hal pelayanan.

2.2.2 Signifikansi Inovasi Program Sebagai Upaya Pengembangan

Perpustakaan Desa

Inovasi program dapat menjadi salah satu upaya pengembangan layanan perpustakaan. Hal ini dikarenakan beberapa penelitian menunjukkan bahwa inovasi program mampu memberikan dampak positif, baik bagi perpustakaan itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Salah satu contohnya adalah inovasi program berupa pengadaan pusat kebudayaan lokal di lingkungan perpustakaan desa terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ruksana (2014), inovasi program tersebut dapat memperbaiki faktor anggaran sebuah perpustakaan. Dari penelitian tersebut, pendapatan perpustakaan jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran perpustakaan dalam menyediakan pelayanannya. Hal itu dapat berdampak pada semakin kuatnya kekuatan anggaran perpustakaan yang bisa digunakan untuk mengembangkan desa, misalnya melalui penambahan koleksi buku-buku terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini dari masyarakat sekitar.

Namun demikian untuk menciptakan suatu inovasi program dalam suatu layanan perpustakaan desa, maka harus memperhatikan strategi pengembangan perpustakaan desa. Hal ini dikarenakan tidak semua ide yang inovatif dalam layanan perpustakaan desa mampu memberikan dampak yang positif baik bagi

perpustakaan maupun masyarakat sekitar. Berikut adalah strategi pengembangan perpustakaan desa menurut Wilson (2004: 28), diantaranya:

1. Peran dan misi
2. Pengembangan infrastruktur
3. Hak masyarakat dalam hal informasi
4. Kendala yang di hadapi masyarakat mendapatkan informasi
5. Etika tanggung jawab penyedia informasi
6. Perpustakaan harus tetap eksis dan berkembang
7. Strategi perpustakaan dalam pengembangan koleksi dan layanan dalam kaitannya dengan pertumbuhan informasi berbasis elektronik
8. Perkembangan teknologi informasi, khususnya akses informasi secara online
9. Sistem perpustakaan & pustakawan yang potensial sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang

Pendapat lain mengenai teori dalam strategi pengembangan perpustakaan desa menurut Sutarno NS (2008: 22) menjelaskan beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

1. Berusaha mengembangkan perpustakaan desa sebagai perangkat layanan publik yang ramah, asri, nyaman, dan menarik bagi penduduk desa yang bersangkutan. Menurut Sinambela dalam Riza (2013: 58) Pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

2. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas pengelola agar dapat bekerja dengan jujur, sepenuh hati, ikhlas dan proposional.
3. Berusaha mengembangkan koleksi bahan pustaka sesuai dengan kemampuan penyelenggara, kebutuhan pemakai dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Meningkatkan peran perpustakaan desa sebagai wahana belajar, dialog, diskusi dan pengembangan wawasan masyarakat setempat
5. Berusaha mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat setempat
6. Berusaha menggalang kekuatan dan semangat bersama untuk mengembangkan perpustakaan desa sebagai salah satu pusat belajar masyarakat
7. Pembinaan perpustakaan desa menganut asas manfaat, untuk sebesar-besarnya melayani kepentingan masyarakat banyak secara demokratis, adil, merata, partisipatif dan tidak memihak kepada siapapun

Sebuah perpustakaan desa dibentuk dengan program untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang informasi dan ilmu pengetahuan. Menurut Sutarno (2008: 42) menjelaskan bahwa pelayanan dari perpustakaan akan berjalan baik apabila perpustakaan dapat menghimpun, mengolah, memelihara, dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka. Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana, petugas yang mempunyai kemampuan, pengalaman dan ketrampilan

dalam melayani masyarakat pengguna jasa yang membutuhkan informasi dan bahan pustaka.